



USUT ASET MANGKRAK

PONTIANAK - Aset-aset lintasan yang terlihat tidak daerah yang dibangun dengan selesai dibangun.

gan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalbar maupun APBN cukup banyak yang tersebar di provinsi ini. Ada yang berfungsi, ada yang terbengkalai atau direstrukturisasi kembali.

Sejumlah aset yang dulu pernah rencananya akan dibangun, seperti velodrome di komplek olahraga Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Rencananya bangunan megah tersebut menjadi tempat lomba balap sepeda dalam multi-ajang. Kondisi bangunan lintasan berupa beton telah mengalami keretakan dan sebagian titik terlihat bekas tambalan. Sementara pagar besi banyak sudah patah bahkan ada satu bagian

“Saya sudah dua kali ke sana. Setelah dibangun dari dana APBN, ternyata tak beroperasi. Temuan di lapangan jalan akses tidak ada. Padahal anggarannya dari APBN Kementerian Perhubungan

Syarif Abdullah Alkadrie

“Sudah terlalu lama bangunan ini. Entah zaman kepala daerah siapa yang membangunnya sampai kini tidak bisa dipakai normal,” ungkap Andrian (33), warga Kota Pontianak.

Tak hanya velodrome, ada Bendungan Merowi yang tidak berfungsi hingga saat ini. Sebab, sejak 1982 bendungan itu tidak berfungsi dengan baik. Sebelumnya sempat mengalir tapi hanya tiga bulan saja. Tidak sedikit dana mengalir dari proyek ini.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1





Usut Aset Mangkrak

Sambungan dari halaman 9

Sementara aset lainnya Pelabuhan Padang Tikar dan Kuala Mempawah yang sudah diaudit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sempat jadi pembicaraan hangat. Itu terungkap dari rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Basarnas, Kementerian PDT, PT. Angkasa Pura II dan PT. Pelindo II di ruang rapat Bandara Supadio Pontianak beberapa waktu lalu.

"Sudah dibangun tapi belum berfungsi sampai sekarang. Ratusan miliar dana masyarakat terbuang percuma kelaut," kata Lasarus, Wakil Ketua Komisi V DPR sekaligus pimpinan rombongan saat rapat.

Menurutnya, seperti Pelabuhan Laut Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya tidak dapat berfungsi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata jalan akses menuju ke pelabuhan tidak ada. Walaupun demikian, prasarana pelabuhan tersebut pelan-pelan terwujud.

Sementara di Kuala Mempawah, pelabuhan lautnya juga mubazir karena sedimentasi sangat tinggi. "Kendala awal adalah masalah studi. Mungkin studinya kurang matang di kementerian terkait," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, persoalan teknis dan penetapan lokasi proyek pembangunan pelabuhan sudah didalami dan dipelajari sejak lama. Dengan begitu, ketika dianggarkan di DPR dan pembangunannya dilaksanakan, masalah seperti ini tidak terjadi karena sudah melalui proses panjang. "Hasil temuan di lapangan tentunya akan kami tindaklanjuti bagaimana supaya bisa berfungsi dan bermanfaat bagi rakyat. Langkah ini akan kami lakukan," ucapnya.

Di sisi lain, tidak kalah mengejutkan nasib Pelabuhan Sedau, Singkawang dengan anggaran mencapai Rp58 miliar dan Pelabuhan Kuala Singkawang. Pelabuhan Sedau yang tak berfungsi kabarnya diambil dari dana Kementerian Perhubungan. "Kami akan tindaklanjuti," kata Lasarus, waktu itu.

Syarif Abdullah Alkadrie, anggota Komisi V DPR RI juga menyayangkan Pelabuhan Padang Tikar yang mangkrak. Padahal lokasinya sangat strategis sebagai akses pelayaran nasional dan internasional. "Saya sudah dua kali ke sana. Setelah dibangun dari dana APBN, ternyata tak beroperasi. Temuan di lapangan jalan akses tidak ada. Padahal anggarannya dari APBN Kementerian Perhubungan," katanya.

Untuk Pelabuhan Sedau dan Kuala Singkawang yang tidak berfungsi maksimal juga dinilai perlu terobosan baru. "Perlu evaluasi menyeluruh kaitan dengan program APBN," ujarnya.

Syarif melanjutkan, masalah Pelabuhan Padang Tikar yang terkesan telantar mendesak untuk dituntaskan. Sebab, potensi aktivitas bongkar muat dan penumpang dinilai tinggi. "Pelabuhan ini akan menjadi penopang ekonomi daerah pesisir dan ekonomi Kalimantan Barat. Untuk itu kita minta Kemenhub segera menyelesaikan," ungkap dia beberapa waktu lalu.

Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut yang digawangi Agus Purnomo tak mampu menjelaskan terperinci soal beberapa proyek pelabuhan laut yang mangkrak di Kalbar. Personelnya hanya bertutur beberapa pelabuhan laut yang dinilai sukses dibangun di Kalbar. Di antaranya Pelabuhan Sukadana, Kendawangan, Tanjung Satai, Teluk

Melano/Batang, Sintete.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji pada akhir tahun 2018, akan mendata aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Aset-aset yang masih bermasalah bakal dituntaskan. Dia meminta persetujuan DPRD Kalbar untuk membahasnya bersama-sama.

"Ada aset disewakan tetapi harganya tidak standar, sangat kecil dan tidak ideal dengan zaman sekarang. Belum lagi aset-aset lain. Akan kami telusuri dan data kembali. Di mana aset hilang, akan kami data dan cari. Sementara aset-aset dikuasai tetapi tak sesuai aturan akan kita ambil alih secepatnya," kata Midji, dihadapan DPRD Kalbar belum lama ini.

Tarif penyewaan aset yang ditetapkan selama ini dinilai janggal. Dia mencontohkan tarif HGB (hak guna bangunan) di salah satu kawasan strategis seperti di kawasan Palapa, Kota Pontianak yang sangat murah. Padahal rumah di kawasan tersebut harganya berkisar antara Rp5-6 miliar.

"Tetapi tanah disewakan selama 20 tahun hanya sekitar Rp20 juta. Waktu saya di Kota Pontianak (wali kota), ruko di Pasar Flamboyan saja yang hanya 64 meter persegi, sewanya sekitar Rp240 juta. Jadi nilai sewa di kawasan strategis Palapa itu tidak ideal. Tarifnya terlalu kecil," ungkapnya waktu itu.

Idealnya, kata Midji, aset milik pemprov yang disewakan untuk satu tahun dihargai 2 sampai 5 persen dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). "Namun yang sekarang diterapkan, hanya dihargai 2 persen saja dari NJOP, tetapi waktunya untuk 20 tahun. Jelas itu sangat merugikan daerah (Kalbar)," ucapnya.

Midji memastikan bahwa ke depan aset-aset mi-

lik Pemprov Kalbar akan dikelola secara profesional sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset-aset yang berada di kawasan strategis tetapi tidak dikelola maksimal kemungkinan akan dilepas.

Untuk mendata aset, Pemprov Kalbar juga tengah menyusun Perda terkait Retribusi tentang aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. "Apabila aset-aset ini dikelola dengan baik maka bisa memberikan manfaat cukup besar bagi Kalbar dan bisa menambah sumber pendapatan daerah (PAD)," ucapnya. "Selama ini, aset pemerintah yang digunakan pihak ketiga dipastikan tidak memberikan keuntungan sama sekali, padahal nilainya semakin tahun semakin naik. Tapi retribusi dari pihak ketiga yang mengelola aset ini tidak bertambah," timpal dia.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah memuji upaya langkah Pemprov Kalbar untuk mengidentifikasi ulang aset-aset milik daerah yang bermasalah. DPRD menyatakan siap member dukungan penuh. "Kita dukung terutama terkait identifikasi harga sewa yang tidak sesuai, pinjam pakai tidak wajar dan aset masih dikuasai pihak lain atau masalah lainnya," ucap dia.

Ketua Gerindra Kalbar ini bahkan akan mengusulkan pembentukan Pansus (Panitia Khusus) Aset di DPRD untuk menelusuri masalah dan kewajaran harga sewa aset. "Apapun, terkait masalah aset kami akan dukung," katanya.

Menurut Suriansyah, mencuatnya persoalan aset ini juga merupakan masukan dari beberapa anggota DPRD Kalbar sebelumnya yang disampaikan di paripurna dan direspon dengan baik. (den)